

ISSN 2830-6015 (online)  
vol.2 no.2 (2023)

# JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK [ JIMAP ]

2023  
DESEMBER



*Program Pascasarjana  
Magister  
Administrasi Publik*

<https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jimap>

Diterbitkan oleh Program Pascasarjana  
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong



## Daftar Isi

## Artikel

- EFEKTIFITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI  
DESA SUNGAI PAYANG KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**Fajar Husbi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi** ..... 176-183
- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETKAB KABUPATEN KUTAI BARAT  
**Paulus, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi** ..... 184-199
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT  
**Petrus Husen, Yonathan Palinggi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya** ..... 200-212
- PELAKSANAAN KEWENANGAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR SKALA KECIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**Muhammad Subandi, Sahrizal, Oktavia Nuraini** ..... 213-222
- EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI KECAMATAN MUARA KAMAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**Muhammad Subandi, Novira Cahya Wulan Sari, Almi Iljab Akim** ..... 223-240

*JIMAP*  
**JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK**

**Penerbit:**

Program Magister Pascasarja (S2)  
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

**Pelindung:**

Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

**Chief in Editor:**

Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, M.Si

**Editorial boards:**

Dr. Gaspar Pera, SE., M.Si.  
Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si.  
Dr. Achmad Zais, SE., M.Si.  
Rusman, S.Sos., M.Si.

**Reviewers:**

Prof. Dr. Iskandar, SE., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia  
Dr. Sudirman, SIP., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia  
Dr. Sabran, SE., M.Si., Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia  
Dr. Marjoni Rachman, M.Si, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia  
Dr. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., Universitas Mulawarman, Indonesia  
Dr. I Made Suidharma, SE., MM., Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia  
Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia  
Agus Fredy Maradona, S.E., M.S.A., Ph.D., Ak., Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

**Administration and Technical Editor:**

Mulyati; Darwin; Endang Wahyuni; Fahririzal; Rossidah; Handayani Miar

**Alamat Redaksi:**

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Magister Administrasi Publik  
Jl. Gunung Kombeng No.27 Kel.Melayu Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512,  
e-mail: [mapunikarta@unikarta.ac.id](mailto:mapunikarta@unikarta.ac.id); HP: 081350321841; 08115544443; 085247358365  
JIMAP diterbitkan pertama kali tahun 2022, Terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT

### FOOD SECURITY POLICY IMPLEMENTATION IN KUTAI BARAT DISTRICT

Petrus Husen<sup>1</sup>, Yonathan Palinggi<sup>2</sup>, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya<sup>3</sup>  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

[petrushusen2@gmail.com](mailto:petrushusen2@gmail.com), [tenaya@unikarta.ac.id](mailto:tenaya@unikarta.ac.id),

*The Regional Government of West Kutai Regency in increasing food ingredients cannot be separated from the intensification, extensification and diversification policies which are also strengthened by the Regulation of the Regent of West Kutai Number 26 of 2012 and Regional Regulation Number: 336/919/DKP-TU.P/2022 concerning the Utilization of Food Yards. Sustainable but on the other hand increasing food supplies also face challenges such as conversion of paddy fields, damage to irrigation canals and technological stagnation. The purpose of this study is to describe and explain the implementation of food security policies in West Kutai Regency as well as to describe and analyze the supporting and inhibiting factors that influence the implementation of food security policies in West Kutai Regency. The number of informants in this study were 7 people consisting of 4 employees and 3 farmers. This type of research uses qualitative methods to describe and explain the implementation of food security policies in West Kutai Regency. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Data analysis using interactive models. The results showed that the implementation of food security policies in West Kutai Regency in increasing local food crop production went through three stages, namely the first through an intensification policy by optimizing existing agricultural land, for example the use of fertilizers, superior seeds and medicines, but in implementing policies Agricultural intensification requires monitoring of the scarcity of subsidized fertilizers and also the distribution of superior rice seeds to farmers. The second is the extensification policy, namely expanding the area that converts unproductive forests into agricultural land. And the third is the diversification policy, namely the diversification of agricultural businesses to increase farmers' household income, for example livestock business*

**Keywords:** Policy implementation, food security

*Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan bahan pangan tidak terlepas dari kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang juga dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor: 336/919/DKP-TU.P/2022 Tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari namun disisi lain peningkatan bahan pangan juga menghadapi tantangan seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran irigasi dan stagnasi teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Barat serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang terdiri dari 4 pegawai dan 3 petani. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan Implementasi Kebijakan ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat dalam meningkatkan produksi tanaman pangan lokal melalui tiga tahap yaitu yang pertama melalui kebijakan intensifikasi dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada, misalnya penggunaan pupuk, benih unggul dan obat-obatan namun dalam implementasi kebijakan intensifikasi pertanian perlu adanya pengawasan terhadap kelangkaan pupuk subsidi dan juga pendistribusian benih padi unggul untuk para petani. Yang kedua kebijakan ekstensifikasi yaitu melakukan perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif menjadi lahan pertanian. Dan yang ketiga kebijakan diversifikasi yaitu penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, misalnya usaha peternakan.*

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, ketahanan pangan

### PENDAHULUAN

Kebijakan pangan merupakan suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjual belikan. Kebijakan publik didesain untuk mempengaruhi operasi sistem pertanian dan pangan. Kebijakan pangan terdiri dari penetapan tujuan produksi, pemrosesan, pemasaran, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan konsumsi bahan pangan, serta menjelaskan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pangan dapat berada pada berbagai level, dari lokal hingga global, dan oleh pemerintah, komersial, hingga organisasi. Kebijakan pangan juga melibatkan institusi pendidikan untuk mendidik, peraturan untuk mengatur, dan standar yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan. Peraturan dan standar yang ditetapkan meliputi kesehatan dan keselamatan, pemberian label, dan kualifikasi produk tertentu (makanan organik, makanan halal, dan sebagainya). Tujuan utama kebijakan pangan adalah melindungi warga miskin dari krisis, mengembangkan pasar jangka panjang yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan produksi pangan yang lalu akan meningkatkan pendapatan petani.

Menurut Jokolelono (2011) bahwa sebagai negara agraris

yang mempunyai potensi tinggi terhadap sektor pertanian, Indonesia masih mengalami masalah ketersediaan pangan. Hal itu terkait dengan masalah pembangunan pedesaan dan sektor pertanian. Seperti di negara Slovakia, pertanian selalu menjadi salah satu bagian terpenting. Promosi kegiatan komersial dan pekerjaan yang berkelanjutan untuk daerah pedesaan sangat penting dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan kepadatan penduduk pedesaan (Holiencinova, 2016). Realitas pertanian di pedesaan setidaknya dipangku oleh tiga pilar, yaitu penguasaan tanah, hubungan kerja, dan perkreditan. Tanah atau lahan masih merupakan aset terpenting bagi penduduk pedesaan untuk menggerakkan kegiatan produksi. Sedangkan relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada pelaku ekonomi di pedesaan. Terakhir, aspek perkreditan pembiayaan berperan amat penting sebagai pemicu kegiatan ekonomi pedesaan. Ketiga pilar tersebut dan perubahannya akan amat menentukan keputusan petani sehingga turut mempengaruhi derajat ketahanan pangan.

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi lahan tropis dengan curah hujan yang cukup, memiliki sumber air



yang memadai dengan banyaknya sungai dan rawa. Selain itu, luas wilayah dan potensi lahan pertanian yang cukup luas seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian guna meningkatkan dan mencukupi sumber pangan di Kabupaten Kutai Barat.

Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan, masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain: (1) Pendapatan warga masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli warga; (2) Teknologi pengolahan pangan lokal masih kurang; (3) Tanggapan Warga tentang kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (4) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (5) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, masih rendah; (6) Alih fungsi lahan pertanian yang terus berlanjut; (7) Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; serta (8) Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan petani dan warga pada umumnya. Kebijakan bahan pangan ini memiliki tiga cakupan yaitu, produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga aspek tersebut sangat tergantung pada seperti apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031 bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pertanian yang ada di Kabupaten Kutai Barat yaitu; 1) Pertanian lahan basah dengan luas sekitar 182.687,96 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) hektar yang berada di seluruh kecamatan, 2) Pertanian lahan kering seluas kurang lebih 718.063,89 (tujuh ratus delapan belas enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan, dan 3) Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 301.795 (tiga ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar meliputi Durian, Langsat, Rambutan, Ithau atau mata kucing, aren.

Pada umumnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fregmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) serta diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menilai perlu untuk melakukan indentifikasi dan inventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan

pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan warga pada umumnya.

Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran. Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) merupakan Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil Analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Hasil analisis FSVA 2019 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 13 Kecamatan yang tersebar di 62 desa dari 194 desa (31,96%) yang terdiri dari 8 Desa (4,12%) Prioritas 1; 31 desa (15,98%) Prioritas 2; dan 23 desa (11,86%) Prioritas 3. Desa Prioritas 1 tersebar di Kecamatan Bongan (desa Gerunggung, Tanjung Soke, Pereng Talik, Muara Siram); Kecamatan Penyingahan di desa Bakung; Kecamatan Pahu di desa Tepian Ulaq; Kecamatan Situq Ngurai di desa Lendian Hang Nayuk; Kecamatan Long Iram di desa Ujoh Halang; Prioritas 2 berada di 9 Kecamatan dan tersebar di 31 desa, Kecamatan Bongan 1 desa (desa Lemper); Kecamatan Muara Pahu 5 desa (desa Dasaq, Jarang Dayak, Jarang Melayu, Tanjung Pagar dan Muara Belonan); Kecamatan Siluq Ngurai 3 desa; Kecamatan Bentian Besar 1 desa (desa Tukuq); Kecamatan Damai 5 desa (Muara Nilik, Mantar, Muara Bomboy, Damai Seberang, Lumpat Dahuq); Kecamatan Nyuatan 6 desa (Sentalar, Jontai, Sembuan, Lakan Bilem, Intu Lingau, Awai); Kecamatan Manor Bulatn 3 desa (Abit, Jengan, Tondoh); Kecamatan Long Iram 2 desa (Long Daliq, Kalian Luar); Kecamatan Tering 5 desa (Muyub Ulu, Tukul, Muyut Aket, Gabung Baru, Tering Lama Ulu); Prioritas 3 berada di 11 Kecamatan tersebar di 23 desa, Kecamatan Bongan 1 desa (Daraya); Kecamatan Jempang 2 desa (Perigiq, Muara Ohong); Kecamatan Penyingahan 1 desa (desa Tanjung Haur); Kecamatan Muara Pahu 2 desa (desa Mendung dan Sebalang); Kecamatan Siluq Ngurai 4 desa (Rikong, Kenyanyan, Muara Kelawit, Muara Ponaq); Kecamatan Bentian Besar 2 desa (Jelmu Sibak, Anan Jaya); Kecamatan Damai 2 desa (Besik, Tepulang); Kecamatan Linggang Bigung (desa Tutung); Kecamatan Melak 2 desa (Empakuq, Muara Bunyut); Kecamatan Manor Bulatn 3 desa (Linggang Marimun, Muara Batuq, Rambayan); Kecamatan Long Iram 3 desa (Longiram

Seberang, Long Iram Bayan, Keliway).

Berdasarkan ulasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Kutai Barat". Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada dua hal yaitu kebijakan bahan pangan dan implikasinya.

### Rumusan Masalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam peningkatan bahan pangan tidak terlepas dari kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang juga dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor: 336/919/DKP-TU.P/2022 Tentang Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari namun disisi lain peningkatan bahan pangan juga menghadapi tantangan seperti konversi lahan sawah, rusaknya saluran irigasi dan stagnasi teknologi, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat.

### METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang humanistik, serta dapat menjelaskan perspektif naturalistik dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Menurut Moleong (2000) bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sementara menurut Noor (2011) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan maks (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi tipe penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan deskriptif

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mempelajari fenomena yang terjadi dilapangan

### Definisi Operasional

1. Implementasi kebijakan ketahanan pangan yang dimaksud sesuai Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Kutai Barat.
2. Intensifikasi merupakan peningkatkan produktivitas pertanian dengan penggunaan pupuk, benih unggul, pestisida dan herbisida.
3. Ekstensifikasi merupakan perluasan area yang mengkonversi hutan tidak produktif menjadi area persawahan.
4. Diversifikasi merupakan penganeekaragaman usaha pertanian sambil usaha perternakan.
5. Jumlah penduduk dan cuaca juga akan mempengaruhi ketahanan pangan, dimana jika penduduk memiliki tingkat kesejahteraan terendah dan pemanfaatan pangan yang membuat tingkat kesehatan semakin rendah akan mengakibatkan kerentanan pangan.

### Fokus Penelitian

Adapun fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan ketahanan pangan khususnya pada warga petani di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi, disfersifikasi dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat.

### Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007) dalam menentukan lokasi penelitian terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan meneliti permasalahan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Dipilihnya lokasi ini karena di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat merupakan dinas yang menjalankan program ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian dilakukan selama lebih kurang 4 bulan yaitu dari dari bulan November Tahun 2021 sampai dengan bulan Februari Tahun 2022.

### Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis diperoleh dari hasil wawancara ataupun pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun

artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, dokumen-dokumen tentang Dinas Ketahanan Pangan maupun dokumen yang terkait implementasi kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat.

### Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mengetahui jumlah informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.  
Data Informan

No.	Jabatan/Status	Jumlah
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	1
2.	Kabid. Ketersediaan dan distribusi pangan	1
3.	Kabid. Konsumsi dan keamanan pangan	1
4.	Pegawai UPTD	1
5.	Warga/Petani 1	1
6.	Warga/Petani 2	1
7.	Warga/Petani 3	1
Jumlah		7

Sumber: Diolah peneliti, 2022

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi  
Menurut Noor (2011) observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Sementara menurut Suwartono (2014) bahwa dengan menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dalam penelitian ini, penulis mengamati langsung bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, dan mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan secara sistematis.
2. Wawancara  
Menurut Usman (2014) wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dilakukan dengan beberapa pertanyaan terstruktur kepada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi menurut Moleong (2000) adalah bahan tertulis atau hal yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi digunakan untuk memperluas penelitian, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat. Teknik pengumpulan data yang

didapat dengan melihat seperti dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan transkrip, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interaktif miles dan huberman. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar serta dialami dari hasil temuan dilapangan.
2. Reduksi. Data Reduksi data dilakukan pada saat peneliti menyeleksi pertanyaan-pertanyaan dari hasil wawancara dengan informan. Peneliti memilih dan memilah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konteks penelitian. Selain itu, peneliti berupaya mengurangi pemborosan kata sejauh tidak mengurangi inti atau makna dari pertanyaan atas informan. Hal ini dilakukan supaya data-data yang disajikan tetap focus dalam menjawab permasalahan penelitian.
3. Penyajian Data. Berdasarkan penyajian data ini peneliti menyajikan data-data hasil wawancara dan observasi. Adapun langkah-langkah mengkoordinasi data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Pada tahap ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip produktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Peneliti masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan- kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, sesungguhnya sudah lama karena sejarah mencatat bahwa, di Barong Tongkok pernah dibentuk KEWEDANAAN pada tanggal 05 November 1952, kemudian pada tahun 1964 telah menjadi penghubung Bupati dari Tenggarong di Barong Tongkok. Pada proses selanjutnya banyak pihak yang terlibat dan berjasa pada beberapa tahun sebelumnya, sehingga pada tanggal 4 Oktober 1999, Lahirnya Undang-Undang Nomor 47 secara kongkret bersama-sama Kabupaten/Kota lainnya dibentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan melantik Pejabat Bupati Ir. Rama A Asia pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka meresmikan Kabupaten Kutai Barat serta melantik Aparatur Eselon II dan III pada tanggal 5 Nopember 1999 di Sendawar.

Setelah berjalan sebagaimana harapan semua pihak,

dengan mengacu kepada segala aturan yang berlaku, maka melalui berbagai upaya terbentuklah Lembaga Legislatif yang pertama dengan dilantikannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 Desember tahun 2000 lebih lanjut Lembaga tersebut lalu menindaklanjuti dengan melaksanakan pemilihan unsur Pimpinan dan terpilihlah Bapak Drs. Y Juan Jenau, MBA sebagai ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat yang pertama. Dalam rangka mengemban amanah rakyat, maka Lembaga Legislatif melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan hasil pemilihan tersebut secara demokratis menghasilkan pasangan sebagai pemenang dan dilantik pada tanggal 19 April Tahun 2001 Bapak Ir. Rama A Asia dan Bapak Ismail Thomas, SM. Hk sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama Kab. Kutai Barat.

Setelah terbentuknya Kabupaten dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati sehingga banyak pihak yang menginginkan agar rentetan fakta sejarah yang ada dapat dijadikan sebagai hari jadinya Kabupaten Kutai Barat. Untuk itu maka pada tanggal 03 November 2001 telah diadakan diskusi yang dihadiri oleh berbagai unsur dan hasilnya menyepakati bahwa tanggal 5 November Adalah sebagai hari jadinya Kabupaten Kutai Barat dan kemudian lalu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tertanggal 04 November Tahun 2002. Dalam pengimplementasian roda pemerintahan, maka selain melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi warga, diperlukan juga berbagai fasilitas terutama Perkantoran sebagai wadah pelayanan Publik. Ketika merencanakan Pembangunan Komplek Perkantoran tersebut, disini berhadapan dengan kendala sulitnya memperoleh lahan yang representatif, sehingga terbentuklah panitia yang bertugas khusus untuk menyediakan lokasi perkantoran sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tertanggal 11 Juni 2001, Nomor: 004.1/K.049/2001 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan untuk pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat Sendawar dan tugas khusus menyiapkan Tata Ruang untuk Pembangunan Kutai Barat yaitu kantor DPRD, Kantor Dinas/Instansi dan Rumah Pejabat Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Ismail Thomas) waktu itu.

Setelah menempuh berbagai upaya dan memilih dari beberapa alternatif yang ada, pada akhirnya melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Ir. Syahrani (alm.) dan Kepala Dinas Pertanian Propensi Kalimantan Timur (Bapak Ir. H. Sofyan Alex), telah bersepakat melalui Berita Acara Penyerahan secara tertulis untuk lahan Pertanian seluas 35 Ha. Mengingat luas lahan tersebut dipandang belum cukup, maka dihimpunlah sejumlah warga warga hingga memperoleh tambahan lahan 100 ha. Dan dari luasan tersebut seluas 135 Ha, dengan rencana penggunaannya adalah 84 ha sebagai Hutan Kota sedangkan

51 Ha untuk lokasi Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2004 setelah pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, serta bisa diterima oleh semua Partai Politik lalu terbentuklah masa bakti yang kedua bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan keberhasilan dari perjuangan masing-masing.

Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2005 khususnya pasal 56 s/d 109, tentang Dasar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak lagi oleh lembaga legislatif, serta berdasarkan pelaksanaan PP. Nomor 06 Tahun 2006 secara langsung oleh warga dengan pasangan yang terpilih adalah Bapak Ismail Thomas, SH dan H. Didik Effendi, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2006-2011 untuk masa bakti pemerintah yang kedua. Pengukuhan melalui sidang Paripurna dan Pelantikannya dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 April 2006.

#### Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

Pada umumnya Visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi Kabupaten Kutai Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021 – 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Kutai Barat yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan warga pada umumnya.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan perwujudan Misi yang ke I yaitu “Meningkatkan perekonomian warga melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan”. Misi ini diarahkan untuk pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dipadukan dengan konsep Pengembangan Kawasan (Kluster). Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan:

- 1) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota warga;
- 2) Berkembangnya ekonomi warga melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan lokal di wilayah masing-masing;
- 3) Warga semakin kreatif dan inovatif serta mampu mengolah sumberdaya yang ada menjadi produk unggulan sehingga memiliki pemasukan ekonomi dan mempunyai daya saing tinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999



tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan warga yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi warga yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan warga. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang berada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon. Sampai dengan Per 1 November 2021 Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 95 orang dengan berbagai tingkat Pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi Pendidikan PNS dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat keadaan bulan November tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Sumber Daya Aparatur menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Kerja Kontrak	Jumlah
1	MAGISTER (S2)	7	-	7
2	SARJANA (S1)	16	26	42
3	DIPLOMA (D3)	3	2	5
4	SLTA	3	34	37
5	SLTP	-	2	2
6	SD	-	2	2
Jumlah		29	66	95

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat ditentukan oleh Pendidikan dan eselon, sampai dengan Tanggal 1 November 2021 PNS di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2.

Aparatur Dinas menurut Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)	Ket
1	Pengatur Muda	II/a	-	
2	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	
3	Pengatur	II/c	2	
4	Pengatur Tk. I	II/d	2	
5	Penata Muda	III/a	11	
6	Penata Muda Tk. I	III/b	1	
7	Penata	III/c	3	
8	Penata Tk. I	III/d	7	
9	Pembina	IV/a	3	
10	Pembina Tk. I	IV/b	-	
11	Pembina Utama Muda	IV/c	-	
Jumlah			29	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

Berdasarkan jumlah eselon yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat berjumlah 12 orang dengan berbagai tingkat Eselon mulai dari Eselon II sampai dengan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3.

Aparatur Dinas menurut Eselon

No	Eselon	Jumlah (orang)
1	Esselon II.A	0
2	Esselon II.B	1
3	Esselon III.A	1
4	Esselon III.B	2
5	Esselon IV.A	8
6	Esselon IV.B	0
Jumlah		12

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jumlah sumber daya aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat menurut jenis kelamin berjumlah 95 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Sumber Daya Aparatur dinas menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Perempuan	56
2	Laki-laki	39
Jumlah		95

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

#### 6. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

Jenis Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi

Aset/sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5.  
Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Filling Kayu	18
2	Lemari Kayu	7
3	Meja Kerja Pegawai	44
4	Sofa	5
5	Kursi Kerja Pegawai	19
6	Kursi Hadap	36
7	Lemari Es	4
8	Dispenser	9
9	Televisi	7
10	AC	15
11	Telepon	30
12	Kursi Rapat Staf	34
13	Meja Rapat Staf (Bundar)	4
14	Kursi Meja Bundar	9
15	Meja 1/2 Biro	23
16	Kursi Kerja Staf	24
17	Printer	26
18	Laptop	27
19	Overhead Projektor	2
20	Camera Digital	1
21	Mesin Tik	2
22	Wireless	1
23	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	2
24	White Board	2
25	Built Cabinet dan White board	2
26	Lemari Kaca	5
27	Meja Credenza	2
28	P.C Unit	13
29	Filling Besi/Metal	4
30	Audio Amplifier (Server)	12
31	Amplifiler	1
32	Kursi Putar	7
33	Stavol	3
34	Kursi Lipat	66
35	Cold Storage	4
36	Hard Disk eksternal	5
37	Alat Penghancur Kertas	1
38	Peti Uang	1
39	KRISBOW/HANDDRYER SINGLE	4
40	Kipas Angin	1
41	Meja Satpam	1
42	Lemari Besi	2
43	Bangku Tunggu	2
44	Papan Pengumuman	1
45	Papan Struktur	1
46	Papan Nama Pejabat	1
47	Layar Proyektor	1
48	Meja Rapat Besar	1
49	Portable Generating Set	2
50	Mesin Rumput	1

No	Jenis Kelamin	Jumlah
51	Kendaraan Dinas Roda 2	-
52	Kendaraan Dinas Jabatan	3
53	Kendaraan Dinas Operasional	1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, 2022

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat secara umum telah dapat menunjang operasional kegiatan dinas, namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas perlu ditambah terutama kendaraan roda empat double cabin mengingat medan yang ditempuh dalam pembinaan kegiatan ketahanan pangan didaerah yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

#### Kebijakan Intensifikasi

Kebijakan intensifikasi dalam rangka ketahanan pangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, contohnya penggunaan pupuk, benih unggul, pestisida dan herbisida. Terkait Pupuk, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat melalui Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan ketika di wawancara menjelaskan hal sebagai berikut:

"Setiap tahun kami berusaha menjaga pasokan pupuk tetap stabil, untuk itu, kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk memajukan pertanian di wilayah kami. Kita mengumpulkan data kebutuhan pupuk petani di setiap daerah Kecamatan Desa/Kelurahan". (Hasil wawancara Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan tanggal 28 Juli 2022)

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kami berkomitmen untuk memajukan semua aspek pertanian daerah, salah satunya dengan fokus memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terjaga. Juga, menurut kepala bidang tersebut ada nomenklatur yaitu pemisahan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat, namun keduanya masih terkait satu sama lain dalam peran dan fungsi tertentu. Saat ini, petani mengaku menghadapi masalah besar, yaitu kelangkaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi. Petani merasa terancam dengan situasi ini, yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Berikut keterangan petani I ketika di wawancarai:

"Saya dan beberapa teman petani di sini belum menerima pupuk subsidi, masalah serupa juga dialami oleh petani lain. Kami hanya mendengar laporan yang beredar bahwa faktor itu karena alokasi pupuk dari pusat tidak mencukupi. Sementara itu, kami merasa terancam akibat kelangkaan pupuk, seperti gagal panen. Untuk itu kami berharap sekali agar pemerintah memperhatikan dan mencari solusi dari permasalahan ini". (hasil wawancara petani I tanggal 29 Juli 2022)

Keterangan di atas memberitahuakn bahwa masih ada konflik berfokus yg sedang dihadapi yaitu pupuk yang langka. Pupuk adalah kebutuhan penting bagi pertanian sebagai akibatnya kelangkaan pupuk bisa berefek tidak baik terhadap pertanian

warga. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait respon pemerintah daerah maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.

“Kelangkaan pupuk yang menjadi perseteruan petani tidak mampu serta merta karena kesalahan pemerintah. Kalau dikaji secara detail, faktor diantaranya pada setahun masih ada beberapa daerah yang mana para petaninya melakukan bisnis pertanian terus menerus sementara penyediaan pupuk selama setahun sangat terbatas. Selain itu adalah penggunaan pupuk secara berlebihan atau melebihi dosis. Solusinya adalah kami melakukan pengecekan ketersediaan pupuk pada masing-masing kecamatan, memastikan kecamatan mana saja yang mengalami kelangkaan & yang masih tersedia stok pupuk untuk berkoordinasi lebih lanjut”. (hasil wawancara Kepala Dinas Ketahanan Pangan tanggal 29 Juli 2022)

Dari keterangan Kepala Dinas tersebut, bahwa Faktor kelangkaan pupuk pula bersumber dari para petani. Ada dua hal disoroti yaitu intensitas aktivitas pertanian terus menerus pada kurun saat 1 tahun dan penggunaan pupuk secara berlebihan atau melebihi dosis. Sementara itu dalam setahun ketersediaan pupuk sangat terbatas. Dinas Ketahanan Pangan Kabupten Kutai Barat terbilang responsif saat mendapati konflik pada di atas yaitu melakukan penelusuran informasi kelangkaan pupuk, mengecek ketersediaan pupuk pada setiap kecamatan dan melakukan koordinasi secepatnya.

Selain pupuk yang menjadi bagian berdasarkan peningkatan produktivitas pertanian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian bibit unggul. Dari penelusuran penulis, setidaknya terdapat dua bibit unggul yang disalurkan oleh dinas Ketahanan Pangan yaitu bibit unggul jagung dan padi. Dinas Ketahanan Pangan mengungkapkan bahwa Pemprov Kalimantan Timur sangat memperhatikan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Misalnya adalah penyediaan bibit unggul jagung yang ketika ini masih pada tahap perencanaan buat dialokasikan ke kecamatan dikabupaten Kutai Barat dengan luas lahan yaitu 400 hektar. Selain itu pula masih ada donasi obat-obatan dan lain-lain. Lebih lanjut, bahwa lahan 400 hektar tadi menyebar pada 9 desa. Kemudian menurut 400 hektar luas lahan tadi sebesar 200 hektar dibebankan pada pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan sisanya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah berharap menggunakan donasi bibit jagung tadi bisa membarui ekonomi warga. Selain bibit unggul beras pula masih ada bibit padi jenis Ciherang. Adapun pendistribusiannya pada taraf paling bawah merupakan melalui Kelompok Tani. Berikut fakta wawancara menggunakan petani 2:

“Setiap tahun kami menerima bibit padi unggul dari ketua kelompok tani. Untuk tahun ini jenis padi unggul yang kami peroleh dari pemerintah adalah Ciherang. Adapun tujuannya adalah agar hasil pertanian meningkat”. (hasil wawancara petani 3 tanggal 29 Juli 2022)

Hasil wawancara dengan petani 2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat setiap

tahunya selalu melakukan pendistribusian bibit padi unggul buat disalurkan ke petani supaya output pertanian meningkat. Jadi, adapun kesimpulan berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi kebijakan intensifikasi tadi yaitu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat khususnya padi, jagung dan ubi kayu mengalami kenaikan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah terdapat petani di beberapa desa yang tidak menerima distribusi pupuk, yang walaupun pemerintah telah berupaya untuk ketersediaan subsidi pupuk, bantuan bibit unggul dan bantuan obat-obatan tetap terjaga. Tetapi pemerintah tidak memperhatikan secara eksklusif kondisi yang terjadi dilapangan dimana terdapat intensitas aktivitas petani terus menerus pada kurun saat 1 tahun dan penggunaan pupuk berlebihan. Sementara itu pada setahun ketersediaan pupuk sangat terbatas. Artinya pemerintah masih belum optimal pada peningkatan ketahanan pangan khususnya dalam distribusi pupuk.

### **Kebijakan Eksensifikasi**

Kebijakan ekstensifikasi adalah ekspansi area untuk mengkonversi hutan tidak produktif sebagai area persawahan. Kebijakan ini setelah ditelusuri di lapangan yakni beredar pada beberapa daerah kecamatan. Penulis menyodorkan pertanyaan kritis berkaitan menggunakan latarbelakang kebijakan tadi. Apalagi bila melihat contoh pada beberapa lokasi misalnya Kalimantan Selatan yang waktu ini mengalami bencana alam banjir. Dari penelusuran WALHI bahwa faktornya merupakan tidak adanya wilayah resapan air yang memadai lantaran sebagian besar hutan telah dialihfungsikan sebagai bisnis tambang dan perkebunan kelapa sawit.

“Kami dalam menetapkan suatu kebijakan tentunya terlebih dahulu melakukan kajian analisis imbas & semacamnya. Kebijakan ini tidak akan beresiko tidak baik misalnya menyebabkan bencana alam. Selain itu, kebijakan ini benar-benar buat kesejahteraan rakyat setempat”. (hasil wawancara hasil wawancara Kepala Dinas Ketahanan Pangan tanggal 29 Juli 2022)

Dari keterangan tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi hutan tidak produktif sebagai lahan persawahan dilatarbelakangi oleh impian untuk kesejahteraan warga khususnya pada sektor pertanian. Dimana semakin luas lahan sawah maka produktivitas pertanian dimungkinkan akan bertambah. Sehingga warga tidak mengalami situasi tidak baik misalnya kerawanan pangan oleh karena sempitnya lahan pertanian. Sementara itu, berdasarkan pengamatan penulis sejauh ini memang tidak terlihat imbas tidak baik berdasarkan kebijakan tadi. Adapun kebijakan tadi yaitu masih ada di beberapa titik desa sebagian hutan telah dialihfungsikan sebagai lahan persawahan bahkan pemukiman warga setempat. Berikut keterangan seorang petani 3:

“Kami membuka lahan persawahan yang dulunya merupakan hutan. Ada baiknya ternyata, hutan yang sekarang berubah jadi sawah dan juga tempat tinggal warga disini. Kami awalnya terkendala masalah air, kemudian terdapat program pemerintah yaitu

menciptakan Air Embung yang sangat membantu”. (hasil wawancara petani 3 tanggal 30 Juli 2022)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selaras dengan konsep pemerintah daerah yaitu kebijakan tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat setempat. Bukti keseriusan tersebut adalah pemerintah juga memastikan supaya tersedianya pasokan air buat lahan persawahan lewat program Air Embung. Sejauh ini rakyat merasakan manfaat dari kebijakan ekstensifikasi tersebut. Jadi, adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan wawancara tentang kebijakan ekstensifikasi ketahanan pangan Kabupaten Kutai Barat yaitu konsep kebijakan pemerintah dan implementasinya sudah berjalan dengan baik, ditandai adanya perluasan area konfersi hutan tidak produktif menjadi area persawahan dan pemukiman warga serta program air embung untuk pasokan lahan persawahan.

#### **Kebijakan Diversifikasi**

Kebijakan Diversifikasi adalah penganekaragaman usaha pertanian untuk menambah pendapatan rumah tangga petani, misalnya peternakan. Dalam konteks kebijakan diversifikasi pemerintah Kabupaten Kutai Barat, menurut buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kutai Barat 2021

mencatat telah mempromosikan produksi pertanian dan mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 41,25% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2020 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Berikut keterangan wawancara Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan:

“Kami berupaya agar warga dapat memproduksi beragam pertanian, artinya variasi seperti ternak sapi, tanaman jagung, padi, sayur dan sebagainya. Untuk ternak sapi, kami telah menyalurkan puluhan hewan ternak terhadap beberapa warga seperti di desa Golo Bilas, kecamatan Komodo. Hal ini dilakukan agar perekonomian warga dapat membaik”. (hasil wawancara Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan tanggal 30 Juli 2022)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya agar ekonomi warga terus meningkat dengan memberikan berbagai bantuan-bantuan salah satunya bantuan ternak sapi di berbagai desa.

Tabel 4.6.

Rekapitulasi pengeluaran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) tahun 2016 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat

No	Tahun	Pengadaan Beras (Kg)	Penyaluran Beras (Kg)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	2016	12.000	3.000	300	1.204	Sudah didroping
2	2017	5.500	8.000	453	1.850	Sudah didroping
3	2018	14.000	20.223	923	3.756	Sudah didroping
4	2019	15.400	15.400	980	4.009	Sudah didroping
5	2020	12.000	11.930	1.712	4.565	Sudah didroping

Sumber: hasil olah data, 2022

Dari tabel diatas menyimpulkan bahwa pengeluaran beras yang terealisasi semua adalah tahun 2019. Dimana pengadaan beras 15.400 kg dan yang disalurkanpun sama yaitu 15.400. sedangkan jumlah KK yaitu 980 dan jumlah jiwa 4.009, artinya pengeluaran beras cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah didroping. Jadi, adapun kesimpulan dari hasil wawancara dan olahan data diatas tentang kebijakan disversifikasi ketahanan pangan Kabupaten Kutai

Barat yaitu kebijakan pemerintah berupaya dan laksanakan konsep kebijakan itu dengan memproduksi beragam pertanian untuk kesejahteraan warga khususnya bantuan ternak untuk beberapa desa yang cocok dan bagus. Namun, keragaman pangan masih menjadi salah satu isu pokok ketika menyinggung soal keragaman pangan di Kabupaten Kutai Barat. Di Kutai Barat, produksi padi yang begitu tinggi justru tidak diimbangi dengan produksi jenis-jenis pangan yang lain.

Di Kutai Barat alokasi lahan untuk padi dan tanaman perdagangan sangat luas, jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura. Untuk tanaman padi misalnya, luas lahan sawah irigasi di Kutai Barat 12.468 (BDK.BPS Pertanian Kutai Barat, 2020) sementara untuk perkebunan kelapa 2.332 hektar, kopi 6.422 hektar, kakao 2.721 hektar, tembako 60 hektar. Sementara

itu luas lahan untuk sector pangan hortikultura hanya sebesar 225 hektar dengan rincian untuk bawang merah 30 hektar, cabai 75 hektar, kubis 15 hektar, petsai 90 hektar, tomat 15 hektar (BDK. BPS Pertanian Kutai Barat 2020). Padahal lahan kering di Kabupaten Kutai Barat tergolong cukup luas yaitu kurang lebih mencapai 70.000 hektar.

#### **Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat.**

##### **1. Faktor pendukung**

Peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan ini di berlakukan di Kabupaten Kutai Barat yang merupakan wilayah pertanian. Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat memiliki hubungan koordinasi antara dinas pertanian dan ketahanan pangan dengan masyarakat. Adapun beberapa hal di bawah ini yang mendukung/membantu berjalannya kebijakan tersebut yaitu

##### **1) Perilaku birokrasi tingkat bawah**

Perilaku birokrasi tingkat bawah bekerja dalam situasi yang ditandai dengan berbagai kebutuhan warga. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat perioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi

warga. Michael Lipsky (1980) menggambarkan birokrasi tingkat bawah ini sebagai “jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat”. Secara substansial, mereka memiliki pertimbangan sekaitan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan berdasarkan posisinya di tengah warga itu, mereka memiliki peluang lebih besar dalam putusan kebijakan. Mereka dapat member pertimbangan, menggunakan pengaruhnya di luar kewenangan formal, sebagaimana Lipsky (1980) menyebut bahwa implementasi kebijakan berpengaruh lebih dominan berasal dari pekerja tingkat bawah ini. Adapun dimensi perilaku birokrasi tingkat bawah yaitu kontrol organisasi. Kontrol organisasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga dalam menangani pangan di kabupaten Nunukan, sehingga staf yang menangani ketahanan pangan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti bekerjasama dengan warga dalam memahami peraturan pemerintah dan membantu menerapkan peraturan pemerintah tersebut. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, kemudian bawahan dengan masyarakat maka diketahui berdasarkan wawancara dengan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kami melakukan pengawasan terhadap kinerja staf yang ada di kantor dalam melakukan kerjasama dengan warga dengan manfaat ketahanan pangan dalam kelangsungan hidup. Pengawasannya itu dilakukan berdasarkan tugas yang diberikan kepada staf agar kami mengetahui kinerja mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, kemudian setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pimpinan akan meminta staf di kantor ini untuk melakukan laporan mengenai hasil tugas tersebut (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tanggal 30 Juli 2022)

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa control organisasi yang dilakukan pimpinan terhadap bawahan dilakukan berdasarkan kemampuan staf dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka yaitu memberikan wewenang kepada mereka untuk bekerjasama dengan warga agar kontrol organisasinya berjalan dengan baik. Kontrol organisasi atau pengawasan yang dilakukan sudah baik pimpinan melihat sejauh mana kinerja para stafnya melalui tugas yang diberikan dan sejauh mana para bawahannya menyelesaikan tugas tersebut agar ketahanan pangan dapat memiliki hasil yang baik. Pengawasan yang dilakukan juga melihat laporan dari hasil kinerja para bawahannya.

## 2) Perilaku hubungan antar organisasi

Dimensi-dimensinya ialah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dalam kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain

sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Dalam tataran implementasi, komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi lain terkait dalam menjaga stabilisasi organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksana program. Sedangkan koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mengatakan bahwa:

“Mengenai komitmen dan koordinasi yang kami lakukan, kami setiap 2 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan beserta lembaga swadaya warga guna untuk membahas tentang keadaan pangan di wilayah masing-masing, dan kami pihak pemerintah dan lembaga swadaya warga menyepakati suatu rencana untuk memberikan yang terbaik untuk para petani agar tetap meningkatkan hasil taninya, dan ketika ada keluhan dari warga maka kami dari pihak pemerintah akan menindak lanjuti keluhan tersebut. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan tanggal 30 Juli 2022).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen dan koordinasi yang di bangun oleh pihak pemerintah sudah berjalan dengan cukup baik, karena pihak pemerintah mengadakan pertemuan dengan lembaga swadaya warga guna untuk membahas tentang keadaan pangan di wilayah masing-masing, dan selalu menyampaikan ketika ada keluhan dari warga dan pihak pemerintah langsung akan menindak lanjuti hal tersebut. Proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi di tandai oleh adanya komitmen dan koordinasi (Winter, 2003) dalam tataran implementasi, komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dan jaringan antar organisasi yang ada. Kontribusi suatu organisasi terhadap implementasi sangat tergantung input yang diterima dari hubungan antar organisasi secara timbal balik dan saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan dapat dicapai pada titik optimal dalam merealisasikan kebutuhan dan kepentingan.

## 2. Faktor penghambat

Selain faktor-faktor yang bersifat mendukung dilaksanakannya kebijakan peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan, ada pula faktor-faktor yang sifatnya



penghambat yaitu Perilaku kelompok sasaran. Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif atau negatif warga dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. (Winter, 2003) Perilaku kelompok sasaran yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi dalam warga yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kebijakan publik berawal dari adanya tuntutan atau dukungan dari sekelompok orang dalam upaya mengatasi suatu permasalahan publik, maka dari itu mereka termasuk kedalam elemen penting dari sebuah kebijakan public (Tachjan 2006). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan Kunci mengatakan bahwa:

“ya beginilah keadaannya, warga biasanya acuh tak acuh mengenai kebijakan tersebut, karena kebanyakan warga malas melakukan hal-hal yang tidak menghasilkan uang, padahal kami mengusahakan agar mereka mendapatkan hasil pangan yang baik dan hasil pangan tersebut juga nantinya akan menghasilkan uang ketika hasil pangan tersebut di pasarkan. (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan tanggal 30 Juli 2022).

Hasil wawancara diatas menurut staf dinas pertanian dan ketahanan pangan yang mengatasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Barat bahwa sebagian warga tidak mau tau atau tidak memberi perhatian terhadap kebijakan ini padahal pihak pemerintah telah mengusahakan agar mereka mendapatkan hasil pangan yang baik dan hasil pangan tersebut juga nantinya akan menghasilkan uang ketika hasil pangan tersebut di pasarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani 2 mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kebijakan tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk warga tani, kebijakan tersebut tidak merata di warga karena tidak semua warga ikut bergabung di kelompok tani, sedangkan yang menerima bantuan tani hanya yang ikut bergabung di kelompok tani. Seharusnya itu pemerintah tetap memberikan bantuan kepada petani yang tidak bergabung dalam kelompok tani seperti saya, saya tidak bergabung di kelompok tani karena menurut saya bergabung dikelompok tani itu buang-buang waktu saja, kenapa saya bilang begitu karena terkadang tempat pertemuan tani yang diadakan tempatnya jauh dari tempat tinggal saya, dan ada juga tetangga saya yang ikut bergabung di kelompok tani, dia selalu mengeluh ketika dia sudah dari pertemuan kelompok tani katanya pihak pemerintah ingin memberikan bantuan tani tapi bantuan tersebut selalu terlambat di berikan jadi sipetani ini biasa mengeluarkan dananya sendiri untuk membeli pupuk, sedangkan tanaman pangannya itu sangat membutuhkan pupuk kalau tidak segera di pupuk maka tanaman pangannya itu di penuhihama. (Hasil wawancara dengan petani 2 tanggal 30 Juli 2022).

Dari hasil wacara tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya warga yang tidak ikut bergabung di kelompok tani yang merespon negative tentang adanya kebijakan ini. Dilihat dari hasil penelitian bahwa warga yang tidak bergabung di kelompok tani hanya ingin mendapat bantuan tani tapi tidak ingin bergabung di kelompok tani. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian tani ini juga belum maksimal diberikan kepada kelompok tani, petani yang mendapatkan bantuan tani juga terkadang mengeluarkan dananya sendiri untuk membeli pupuk. Upaya yang perlu ditekankan adalah bantuan tani harus selalu tepat waktu agar petani tidak kesulitan dalam mengelola tanaman pangan. Bila diberikan bantuan tani secara tepat, maka petani juga akan memberikan respon yang baik terhadap kebijakan ini.

### **Pembahasan**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan warga di Kabupaten Kutai Barat karena mayoritas penduduk Kabupaten Kutai Barat bekerja sebagai petani. Ada banyak cara untuk meningkatkan hasil produksi pertanian salah satunya adalah dengan cara intensifikasi (usaha meningkatkan pendayagunaan lahan dengan panca usaha tani) pertanian. Intensifikasi usaha tani yang penuh dapat meningkatkan hasil produksi. Perkembangan pemanfaatan teknologi modern melalui rekombinasi telah menghasilkan produk biologi baru untuk meningkatkan produksi pertanian maupun produk pangan dan produk pakan yang berkualitas. Produksi yang meningkat menjamin tercukupinya kebutuhan beras pada tingkat petani dan pada suatu saat tidak menutup kemungkinan juga mencukupi kebutuhan beras seluruh warga di Kabupaten Kutai Barat. Intensifikasi pertanian dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian dan sekaligus berpengaruh terhadap ketahanan pangan warga (Hartono et al, 2010). Pangan di Indonesia khususnya Kutai Barat mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagian besar makanan pokok penduduk berasal dari sereal yang terdiri dari beras, jagung dan ubi kayu. Konsumsi makanan pokok terbesar penduduk adalah beras. Oleh karena itu masalah ketahanan pangan di Kutai Barat menjadi penting untuk kesetabilan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan utama yang harus dikembangkan oleh pemerintah Kutai Barat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selalu berupaya agar dalam penyaluran benih padi unggulan, pupuk bersubsidi dan obat-obatan dapat membantu warga agar hasil pertanian meningkat. Tetapi kemudian, pemerintah tidak memperhatikan secara mendalam atas program-program tersebut, sehingga masih banyak warga di berbagai desa yang tidak mendapatkan hasil bantuan itu khususnya pupuk bersubsidi. Berdasarkan pengamatan penulis, pemerintah Kutai Barat perlu dioptimalkan lagi terkait persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi agar dapat meningkatkan ketahanan pangan.

Komitmen pemerintah daerah Kutai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan hortikultura dan pekebunan selain padi, jagung sebagai salah satu varietas unggulan mulai terealisasi. Hal tersebut

didukung pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan konversi hutan tidak produktif sebagai lahan pertanian jagung. Kegiatan panen simbolis jagung hibrida dikelompok tani menjadi saksi nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan impiannya untuk memajukan kesejahteraan rakyat setempat.

Kebijakan diversifikasi produksi pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Diversifikasi produksi pangan bermanfaat bagi upaya peningkatan pendapatan petani dan memperkecil resiko berusaha. Diversifikasi produksi secara langsung ataupun tidak juga akan mendukung upaya penganeekaragaman pangan (diversifikasi konsumsi pangan) yang merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Ada dua bentuk diversifikasi produksi yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu:

- a. Diversifikasi horizontal; yaitu mengembangkan usahatani komoditas unggulan sebagai “*core of business*” serta mengembangkan usahatani komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha
- b. Diversifikasi regional; yaitu mengembangkan komoditas pertanian unggulan spesifik lokasi dalam kawasan yang luas menurut kesesuaian kondisi agro ekosistemnya, dengan demikian akan mendorong pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai wilayah serta mendorong pengembangan perdagangan antar wilayah.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, terdapat 3 komponen primer pada implementasi kebijakan ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat yaitu:

1. Intensifikasi kebijakan, yaitu pemerintah berkomitmen memajukan aspek pertanian daerah dimana salah satu fokusnya ialah memastikan akan kebutuhan pupuk para petani tetap terjaga. Selain pupuk pendistribusian bibit unggulan juga termasuk hal yang paling krusial dalam peningkatan produktivitas pertanian.
2. Ekstensifikasi kebijakan, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi hutan tidak produktif menjadi lahan persawahan atau lahan pertanian yang dilatarbelakangi oleh cita-cita untuk kesejahteraan warga khususnya disektor pertanian. Dimana semakin luas lahan sawah maka produktifitas pertanian dimungkinkan akan bertambah. Sehingga warga tidak mengalami situasi buruk seperti kerawanan pangan oleh karena sempitnya lahan pertanian yang dimiliki.
3. Disersifikasi kebijakan, yaitu pemerintah berupaya agar warga dapat memproduksi beragam usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani. Salah satu contohnya pemerintah sudah menyalurkan beberapa

sumbangan kepada petani berupa hewan ternak, tanaman jagung dan padi dibeberapa desa/kelurahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. 2014. Kebijakan Publik, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Badan Ketahanan Pangan. 2013. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
- Burhanuddin Y, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Edward III, G.C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Erwan, P.A. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media
- Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 358-375.
- Hamdi, M. 2014. Kebijakan Public: Proses, Analisis Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Holiencinova. M, Ludmila, Nagyova, Rovni. P, Dobak. D, Bilan. Y.2016. “Economic Sustainability Of Primary Agricultural Production in The Slovak Republic”. *Journal Of Security and Sustainability Issues*. Vol 6. No 2.
- Jokolelono. E.2011. “Pangan dan Ketersediaan Pangan”. *Media Litbang Sulteng*. Vol 4.
- Jumiati, J. (2020). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 12-23.
- Lassa, Jonnaton. 2005. *Jurnal. Politik ketahanan Pangan Indonesia*.
- Maghfiroh, R., Ati, N. U., & Sunariyanto, S. (2021). Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo). *Respon Publik*, 15(4), 67-74.
- Malayu H.SP. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mazmanian, D. H., & Sabatier, A.P. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, D. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, M. 2005. *Metode penelitian*. Bogor Selatan: Galia Indonesia.
- Ngainun, N. 2017. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2031
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. tahun 2011 tentang

- penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Samodra W.1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Saragih, B.1998. Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (Kumpulan Pemikiran). Bogor: Yayasan Persada Mulia Indonesia.
- Soekirman.1996.Ketahanan Pangan: Konsep Kebijaksanaan dan Pelaksanaannya. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketanahnan Pangan Rumah Tangga: Yogyakarta
- Solichin. W.A.1991. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryana. 2008. Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat Dan Proses Menuju Sukses, Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwartono. 2014. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tahir, A. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
- Thoha, M. 2012. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- Waluyo.2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung:Mandarmaju.